

SILaK SEBAGAI MODEL E-GOVERNMENT BERBASIS SMARTPHONE: SUATU INOVASI BPKAD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AGUS, HARDI WARSONO, SUKMAJAYA

UIN Mataram, Universitas Diponegoro Semarang, Bappeda Lombok Tengah

Aguscandra.lombok@gmail.com, hardi_wsn@live.undip.ac.id, sukmajayahardian@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi komunikasi salah satunya android smart-phone telah menjadi model baru praktik e-government dalam inovasi layanan publik di negara-negara maju dan negara berkembang. E-government juga tengah berkembang pesat dalam birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah. Adopsi e-government sejalan dengan pergeseran paradigma manajemen publik dari Old Public Administration (OPA) menuju New Public Management (NPM), bahkan saat ini telah masuk pada New Public Service (NPS). NPM merupakan paradigma yang memfokuskan layanan publik secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan kompetitif. Oleh karenanya, NPM dimanifestasikan melalui berbagai inovasi birokrasi. Tulisan ini mendiskusikan sistem informasi layanan asset dan keuangan (SILaK) sebagai model praktik e-government pada kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Hasil analisis menunjukkan SILaK telah masuk kategori inovasi birokrasi yang mencakup tiga bentuk; menciptakan barang atau layanan baru yang lebih baik, mengembangkan cara baru dalam layanan publik, dan menciptakan cara baru untuk organisasi. SILaK juga menggambarkan pergeseran praktik paradigma birokrasi pemerintah daerah dari OPA menjadi NPM, melalui e-government.

Kata kunci : *SILaK, E-Government, Kebijakan Publik*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK) memberi manfaat bagi organisasi dalam pelaksanaan manajemen. Organisasi publik merupakan organisasi yang paling diuntungkan dari kemajuan TIK tersebut, guna menjawab tantangan perubahan dalam layanan publik.

Muncullah sejumlah konsep tentang elektronik pemerintahan (*e-government*), elektronik administrasi (*e-administration*), tata kelola elektronik (*e-governance*). Pramuka memberi catatan ada tiga istilah yang sering dipersamakan, namun memiliki fokus yang berbeda, yakni *Elektronik Governance (e-governance)*, *Elektronik Government (e-government)*, dan *internetworked Government (i-Government)*.¹ Masing-masing konsep ini memiliki fokus yang dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Tulisan ini mengambil fokus studi praktik model *e-government* dengan situs Sistem Informasi Layanan Aset dan Keuangan (SiLaK) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Tengah.

Budd dan Harris mendefinisikan *e-government* sebagai integrasi kapasitas teknologi informasi, terutama situs web, internet, database, untuk memungkinkan layanan melalui media informasi teknologi.² Dengan demikian, munculnya *e-government* adalah karena pergeseran dari teknologi ke manajemen termasuk pengembangan kinerja ruang lingkup dan niat kebijakan. Hal ini merupakan alasan mengapa *e-government* telah menjadi konsep penting dalam semua bidang administrasi publik termasuk aplikasi dalam sistem informasi dan TIK.³

Tulisan ini mendiskusikan SiLaK sebagai inovasi layanan publik yang dipraktikkan pada BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Perspektif yang

¹Pramuka, Gatot, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dimuat dalam buku *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, editor Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010): hlm.78

²L. Budd, & Harris, L. (2004). *E-Economy: Rhetoric or business reality*. London: Routledge ECEG 2008, Switzerland: 93:104

³Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M. (2017). An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA). *Government Information Quarterly* 1–20.



digunakan adalah *electronic-Government (E-Government)* dalam praktik manajemen perubahan di sektor publik. Ada dua fokus yang didiskusikan. *Pertama*, dalam perkembangan paradigma manajemen publik, dimanakah letak posisi paradigmatis SILaK?. *Kedua*, dalam batasan konseptual tentang inovasi birokrasi, SILaK merupakan inovasi birokrasi dalam bentuk apa?.

B. Tinjauan Pustaka

Karena studi ini merupakan kategori studi manajemen publik, maka pertama-tama perlu didudukkan konsepsi tentang manajemen publik. Cara untuk memahami manajemen publik yakni melalui identifikasi perbedaannya dengan manajemen sektor privat. Tabel 1 diharapkan dapat membantu penjelasan perbedaan kedua jenis manajemen tersebut

Tabel 1
Perbedaan Manajemen Publik dan Privat

No	Dimensi	Perbedaan	
		Manajemen Publik	Manajemen Privat
1	Goals	Umum, jarang ditinjau kembali/diubah, kompleks, saling bertentangan, dirumuskan oleh lembaga politik, tujuannya kolektif/politik	Profit oriented (ekspansi, dominasi pasar, reputasi bisnis)
2	Akuntabilitas	Bertanggungjawab kepada public/rakyat yang dilayani	Bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil, penggunaan sumber

			daya,penyediaan barang dan jasa kepada pemegang saham, pekerja, supplier dan customer
3	Struktur	Delegasi wewenang dan diskresi dibatasi, hierarkhis, mekanistik	Fleksibel

Sumber: Farhham dan Horton, dalam Keban (2004)⁴

Selain melalui identifikasi perbedaannya dengan manajemen privat, cara untuk memahami manajemen publik yakni pada memperhatikan fokus kajiannya. Manajemen publik memiliki fokus kajian pada proses pengaturan yang berhubungan dengan perbaikan kinerja instansi pemerintah, hubungan organisasi pemerintah dengan lingkungan eksternal, dan cara mencapai misi organisasi.⁵Dengan memperhatikan pada dua ahli di atas, nampak fokus utama kajian manajemen publik berkaitan dengan perihal strategi yang seharusnya dilakukan instansi pemerintah atau non-pemerintah.Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan eksternal dengan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki dalam internal organisasi.

Berbagai perubahan telah terjadi dalam studi administrasi publik di banyak negara seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi.Setidaknya ada tiga perubahan yang menjadi tantangan manajemen organisasi publik di era industri 4.0, yakni globalisasi, demokratisasi, dan teknologi komunikasi informasi. Untuk menjawab

⁴Yeremias, T. Keban, Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu, Edisi 2, Yogyakarta, Gavamedia (2008)

⁵Nurman,Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, (2015): hlm.13



tantangan ini sejak awal Denhardt dan Denhardt dalam buku yang ditulis berjudul *The New Public Service* telah mengemukakan terdapat tiga pergeseran perspektif dalam manajemen publik, masing-masing dikenal sebagai *old public administration* (OPA), *new public management* (NPM), dan *new public service* (NPS).⁶

OPA sebagai paradigma pertama manajemen publik diperkenalkan oleh Woodrow Wilson (1887-1987). Ia seorang mantan Presiden AS dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University AS. Statemennya yang cukup tersohor adalah “melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya”. Menurut Wilson, tugas utama administrator publik adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana tugas ini harus dilaksanakan secara netral, profesional, dan lurus ke arah yang telah ditetapkan dalam tujuan kebijakan. Ada dua doktrin yang ditanamkan Wilson pada administrator publik. *Pertama*, ada perbedaan yang jelas antara politik (*policy*) dan administrasi. Politik itu berkaitan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih. Sedangkan administrasi itu kompetensi yang netral yang harus dijalankan oleh birokrasi. *Kedua*, untuk menjalankan kompetensinya secara netral dan profesional, birokrasi dan manajernya harus diberi otonomi untuk menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Dalam perjalanannya kemudian paradigma OPA dijelaskan melalui 9 karakteristik:

1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang disediakan oleh instansi pemerintah;

⁶ Dikutip dari Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Prenada Media Group, (2018): hlm.71-84



2. Kebijakan publik dan administrasi saling berkaitan dalam ikhtiar mencapai tujuan politik;
3. Administrasi publik memainkan peran lebih kecil dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi memainkan peran besar pada implementasi kebijakan;
4. Pemberian pelayanan harus dilakukan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik, tetapi boleh diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
5. Administrator bertanggungjawab kepada pejabat politik hasil pemilihan;
6. Program dan kegiatan para administrator diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan control oleh hierarki di atasnya;
7. Nilai utama administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;
8. Administrasi dijalankan dengan sangat tertutup, karena itu keterlibatan masyarakat bersifat terbatas;
9. Peran administrator dirumuskan secara sangat jelas sesuai fungsi-fungsi manajemen; planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.⁷

Gagasan paradigma OPA di atas memperlihatkan bahwa OPA menekankan kerja administrasi publik sangat mekanistik, formal dan hirarkhis. Cara berpikir ini dapat dipahami karena OPA mendapat pengaruh kuat dari birokrasi Weberian. Ada tujuh prinsip birokrasi yang digagas

⁷ Konsep ini juga dikemukakan oleh Inu Kencana Safiie, Djamaludin Tanjung, dan Supardan Modeong, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, PT. Rineka Cipta, (1999): hlm.75-93



Weber yang selanjutnya ia sebut sebagai ciri masyarakat modern; (1) yurisdikional, dimana birokrasi di atur oleh kaedah, hukum dan administrative; (2) prinsip hierarki jabatan dan tingkatan kewenangan, dimana berlaku prinsip pengawasan pejabat rendah oleh pejabat lebih tinggi; (3) prinsip manajemen jabatan didasarkan pada dokumen tertulis yang asli atau-pun masih draf; (4) prinsip manajemen jabatan yang terspesialisasi berdasarkan pelatihan dan keahlian; (5) prinsip manajemen jabatan stabil, menyeluruh, dan mudah dipelajari.⁸

Dalam perkembangannya paradigma OPA mendapat sejumlah kritik, sehingga muncul paradigma *new public management* (NPM).Paradigma ini berusaha menerapkan mekanisme dalam sistem pasar untuk diadopsi pada organisasi publik.Oleh karena nuansanya adalah manajemen privat, pendekatan NPM menekankan agar semua manajer organisasi publik menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal.Sering juga paradigma NPM dikenal ingin menerapkan konsep privatisasi dalam pelaksanaan layanan publik.Maka untuk mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik, pimpinan birokrasi publik harus terus meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif-alternatif.

Paradigma NPM banyak diminati di negara-negara Eropa khususnya Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton setelah David Osborne dan Ted Gaedler memperkenalkan konsep “*reinventing government*”.Menurut Osborne, *reinventing government* pada hakekatnya adalah upaya untuk mentransferkan jiwa dan kinerja wiraswasta ke dalam

⁸ Max Weber, judul aslinya *Essays in Sociology*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Noorkholis menjadi *Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2006): hlm. 236



birokrasi pemerintah. Jiwa wiraswasta ini menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dimiliki organisasi publik dari yang tidak produktif menjadi produktif. Selanjutnya Osborne menyebutkan sepuluh prinsip wiraswasta birokrasi publik; (1) pemerintahan harus berpikir sebagai katalis; (2) pemerintahan milik masyarakat; (3) pemerintah kompetitif; (4) pemerintah berorientasi misi; (5) pemerintah berorientasi pada hasil; (6) pemerintah berorientasi pelanggan; (7) pemerintah wiraswasta; (8) pemerintah antisipatif; (9) pemerintah desentralisasi; (10) pemerintahan berorientasi pasar.⁹

Periode ketiga dari perkembangan paradigma manajemen publik yakni *new public service* (NPS) sebagai konsep yang menekankan pada banyak elemen. NPS dibangun atas empat ide dasar; (1) *democratic citizenship*; (2) model komunikasi dan *civil society*; (3) organisasi humanism; (4) postmodern ilmu administrasi publik.¹⁰ *Democratic citizenship* berkaitan dengan isu-isu umum tentang keterlibatan individu ke dalam kehidupan politik, termasuk mengenai hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *democratic citizenship* diartikan berkaitan dengan kemampuan individu dalam mempengaruhi sistem politik dan partisipasi politik. Dengan demikian, *democratic citizenship* menjelaskan tentang kebebasan yang dimiliki individu untuk terlibat dalam organisasi, sebagai komunitas politik, dan mempengaruhi sistem politik yang ada. Menurut konsep *democratic citizenship*, tugas utama pemerintah adalah menjamin warga negaranya bisa membuat pilihan-pilihan yang bebas dan selaras dengan kepentingan individu bersangkutan.

⁹ Miftah thoa, *ibid*: hlm.78-81

¹⁰ *Ibid*, hlm. 84



Oleh karena sifat kebutuhan dan kepentingan individu yang dinamis, *civil society* semakin mampu menyediakan layanan-layanan publik, perkembangan ekonomi semakin membaik, teknologi komunikasi semakin maju, sementara birokrasi masih memiliki sejumlah masalah, maka tuntutan kedua terhadap pimpinan birokrasi adalah ia harus mau berubah. Lingkungan birokrasi tentu saja kompleks. Sebagai cara mempermudah ingatan dipandang relevan menggunakan gaya penjelasan Uyung Sulaksana ketika berbicara tentang lingkungan organisasi yang menuntut adanya perubahan. Ia menggunakan konsep PETS sebagai singkatan dari Politik, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial-budaya sebagai faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perubahan organisasi.¹¹ Penjelasan yang hampir sama dikemukakan oleh Wibowo dengan mengidentifikasi 11 faktor yang mendorong organisasi harus berubah; (1) kuatnya tekanan politik; (2) perkembangan ekonomi; (3) kebijakan pemerintah dan sistem ekonomi; (4) kecenderungan social; (5) kecenderungan demografis; (6) perkembangan teknologi yang semakin efisien; (7) kecenderungan organisasi dalam struktur dan skala; (8) perkembangan pasar yang semakin kompetitif; (9) masalah sumber daya manusia dan manajer; (10) meningkatnya tuntutan pelanggan; (11) tekanan lingkungan.¹²

Sedangkan permasalahan dalam organisasi birokrasi yang mendorong harus dilakukannya perubahan adalah karena adanya sejumlah permasalahan dalam organisasi birokrasi itu sendiri. Eko Prasojomengidentifikasi empat permasalahan birokrasi di

¹¹ Uyung Sulaksana, *Manajemen Perubahan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2004):11

¹² Wibowo, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, (2016): hlm.103



Indonesia. *Pertama*, struktur organisasi yang masih sangat gemuk menyebabkan negara menjadi birokratis. *Kedua*, mental-model SDM yang masih belum sesuai dengan tuntutan zaman, seperti masih memiliki mental priyai, patronase, dan feodalisme, mengutamakan jabatan struktural, dan prosedural. *Ketiga*, masih maraknya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *Keempat*, manajemen kinerja yang buruk. Birokrat hingga saat ini belum memiliki budaya untuk selalu mengukur kinerja yang telah dilakukannya.¹³

Usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi di berbagai negarai adalah mendorong inovasi birokrasi melalui praktik *e-government*.¹⁴ Inovasi dipahami dalam berbagai makna, seperti tingkat kepercayaan bahwa organisasi publik menghasilkan ide-ide baru untuk meningkatkan penyediaan layanan publik atau pembentukan produk baru.¹⁵ Kastle dan Stewart-Weeks, membagi jenis inovasi organisasi publik dalam lima bentuk,; (1) menciptakan barang dan layanan baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam praktik kebijakan publik; (3) menemukan target pasar baru; (4) mengidentifikasi sumber daya baru; (5) menciptakan cara baru untuk berorganisasi.¹⁶

Untuk mengurangi birokratisasi dalam layanan publik, konsep tentang *e-Government* semakin meningkat. Pramuka memberi catatan ada

¹³ Eko Prasajo, *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas & Dinamika Perubahan Birokrasi di Indonesia*, FIA UI Press, (2020): hlm. 66-68

¹⁴ P.Trott, *Innovation Management and New Product Development*, Pitman, London (1998)

¹⁵ Lee, H. and Choi, B. (2003), "Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 20 No. 1, pp. 179-228

¹⁶ Tim Kastle dan Martin Stewart-Weeks, *How Does Innovation Work in the Public Service*, *Australian Journal of Public Administration*, 74 (1), 2015: 63-67



tiga istilah yang sering dipersamakan, namun memiliki fokus yang berbeda, yakni *Elektronik Governance*, *Elektronik Government*, dan *internetworked Government (i-Government)*.

Tabel 1.

Karakteristik dan Fokus E-Governance, E-Government, dan I-Government

Konsep	Fokus
E-Governance	Fokus pada jejaring inter, intra dan antar pemerintah dengan masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan teknologi informasi ditujukan untuk membangun, memperbaiki proses, dan memperlancar hubungan dalam organisasi pemerintah dan antar organisasi pemerintah dengan masyarakat b. Terdapat tiga lingkup yang terintegrasi satu dengan yang lainnya yaitu lingkup inter, intra dan antar pemerintah dengan masyarakat
E-Government	Focus pada layanan pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan teknologi informasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dan kelancaran layanan pemerintah kepada publik
I-Government	Focus pada model organisasi berbasis teknologi informasi yang merupakan model organisasi era digital

Sumber: Gatot Pramuka.¹⁷

¹⁷ Gatot Pramuka, E-Government dan Reformasi Layanan Publik, dimuat dalam buku Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance, editor Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010):halm.78

Dari pemikiran Pramuka di atas, alasan teoritik studi ini menggunakan konsep *E-Government* karena tujuan dari SILaK adalah mempermudah layanan pemerintah daerah khususnya BPKAD Kabupaten Lombok Tengah secara efektif dan efisien dengan menggunakan *smart phone* sebagai teknologi komunikasi informasi yang merupakan alat komunikasi masyarakat paling dominan era ini. Dengan demikian, BPKAD Kabupaten Lombok Tengah telah memanfaatkan penggunaan teknologi *smart phone* sebagai peluang melakukan inovasi birokrasi.

C. SILaK Sebagai Inovasi Birokrasi

Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah bidang perbendaharaan daerah. Salah satu rangkaian kerja bidang perbendaharaan adalah penatausahaan keuangan daerah, dimana proses pencairan belanja APBD dilakukan. Di Alur proses pencairan dana secara manual digambarkan secara sederhana sebagai berikut; (1) diawali dengan pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD); (2) berkas SPP dan SPM diajukan kepada BPKAD; (3) BPKAD melakukan pemeriksaan dan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap, BPKAD mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D); (4) pencairan dana OPD dilakukan oleh Sub-Bidang Pengelolaan Kas Daerah. Dengan memperhatikan alur proses tersebut, nampak bahwa proses pencairan anggaran pada BPKAD Kabupaten Lombok Tengah terlalu birokratis dengan jalur yang panjang, dan konsekuensinya melibatkan banyak orang.

Secara umum dapat dideskripsikan permasalahan klasik layanan publik pada BPKAD Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut. Proses pencairan anggaran merupakan area yang didalamnya terdapat banyak



kepentingan dengan proses yang panjang berpotensi terjadinya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pegawai BPKAD dipandang riskan dalam penyalahgunaan kekuasaan, sebagai konsekuensi mereka berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif dengan pimpinan proyek, kepala OPD, rekanan pengadaan barang, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Semua aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan terhadap pencairan anggaran yang cepat. Oleh karenanya mereka cenderung memberikan “hadiah” kepada pegawai BPKAD untuk proses percepatan pencairan tersebut. Sistem informasi pencairan anggaran di BPKAD juga belum terbangun dengan baik. Akibatnya muncul *streetipe* layanan publik BPKAD Kabupaten Lombok Tengah sebagai layanan yang birokratis, berbelit-belit, lamban, tidak efektif, dan tidak efisien.

Sebagai usaha untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN, BPKAD kabupaten Lombok Tengah membuat inovasi SILaK yang dapat dimanfaatkan oleh semua aktor pencairan anggaran dalam pencairan anggaran dan laporan keuangan daerah secara umum. Tujuan SILaK sebagai inovasi yakni; (1) secara universal mendukung reformasi birokrasi di era revolusi industri 4.0; (2) efieisnei dan efektivitas proses pencairan anggaran; (3) kenyamanan kerja bagi pengawai BPKAD; (4) mendukung pemberantasan KKN; (5) membangun kepercayaan publik; (6) membuka akses bagi *stakeholder* untuk memperoleh informasi melalui *smart phone*; (7) menjadikan BPKAD Kabupaten Lombok Tengah memiliki inovasi layanan berbasis android.

Hasil yang terlihat setelah pelaksanaan inovasi layanan publik melalui SILaK BPKAD sebagai berikut. *Pertama*, setelah inovasi dikembangkan *stakeholder* mendapatkan informasi tentang pencairan anggaran mereka dengan cara mereka harus mendatangi Kantor BPKAD



Kabupaten Lombok Tengah, bertemu dengan pegawai, bahkan untuk sekedar bertemu dengan pegawai harus menunggu cukup lama. Maka setelah inovasi dikembangkan, *stakeholder* bisa mengakses sendiri dan *realtime* melalui *smart phone* dari rumah, kendaraan, atau kantor sendiri. *Kedua*, suasana kerja di kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah lebih nyaman karena tidak ada lagi orang berdatangan untuk mencari informasi pencairan anggaran. *Ketiga*, pembatasan pertemuan secara langsung antara pegawai BPKAD dengan *stakeholder* dalam proses pencairan anggaran mengurangi peluang perilaku KKN. *Keempat*, tumbuhnya kepuasan *stakeholder* BPKAD karena mereka dapat mengakses informasi layanan pencairan anggaran melalui *smartphone*.

Dari seluruh deskripsi data di atas, dapat dijelaskan beberapa analisis pembacaan terhadap SILaK. *Pertama*, dengan merujuk pada perspektif Kastelle dan Stewart-Weeks tentang bentuk-bentuk inovasi birokrasi, maka SILaK merupakan inovasi birokrasi yang memenuhi tiga bentuk; (1) menciptakan barang baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam layanan publik; (3) menciptakan cara baru untuk organisasi publik. SILaK sebagai bentuk inovasi menciptakan barang baru karena dalam SILaK layanan publik dilakukan melalui *smart phone* tidak lagi manual seperti sebelum inovasi diciptakan. Sebagai cara baru dalam layanan publik karena SILaK memberikan layanan dengan cara dimana saja dan kapan saja. Orang dapat mengakses layanan proses pencairan anggaran tanpa harus datang langsung ke Kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan sebagai cara baru dalam organisasi, SILaK memperkenalkan cara-cara modern dalam organisasi birokrasi yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.



Apabila ditark kebelakang, maka SILaK dapat pula dikategorikan sebagai manifestasi dari paradigma NPM, khususnya teori Osborne mengenai *reinventing government*. Indikatornya adalah SILaK menggambarkan kemampuan birokrasi pemerintah daerah yang berpikir sebagai katalis, kompetitif, berorientasi pada hasil, dan berorientasi pada pelanggan. Manifestasi paradigma administrasi publik dalam konteks SILaK tergambar dari kemampuan inovasi ini dalam memotong jalur birokrasi layanan pencairan anggaran. Dengan demikian, birokrasi Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya sudah mulai melepaskan diri dari perangkat OPA dan bergeser pada NPM. Bentuk nyatanya adalah SILaK merupakan inovasi briokrasi pemerintah daerah berbasis *e-government*.

D. Kesimpulan

SILaK sebagai inovasi birokrasi pada kantor BPKAD Kabupaten Lombok Tengah merupakan inovasi yang masuk dalam tiga kategori bentuk inovasi dari Kastle dan Stewart-Weeks, yakni; (1) menciptakan barang baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam layanan publik; (3) menciptakan cara baru untuk organisasi publik. Secara paradigmatic, SILaK menggambarkan pergeseran praktik paradigma birokrasi pemerintah daerah dari OPA menjadi NPM, melalui *e-government*. Dengan demikian, SILaK dapat dikategorikan sebagai salah satu inovasi birokrasis berbasis *e-government*.



DAFTAR PUSTAKA

- Budd, L., & Harris, L. (2004). *E-Economy: Rhetoric or business reality*. London: Routledge ECEG 2008, Switzerland: 93:104
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M. (2017). An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA). *Government Information Quarterly* 1 (2017): 20.
- H. Lee, and Choi, B. "Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 20 No. 1, (2003) pp. 179-228
- Kastelle, Tim dan Martin Stewart-Weeks, *How Does Innovation Work in the Public Service*, *Australian Journal of Public Administration*, 74 (1), 2015: 63-67
- Keban, Yeremias, T. *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi 2, Yogyakarta, Gavamedia (2008)
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, (2015): hlm.13
- Pramuka, Gatot, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dimuat dalam buku *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, editor Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010):halm.78
- Prasojo, Eko, *Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas & Dinamika Perubahan Birokrasi di Indonesia*, FIA UI Press, (2020): hlm. 66-68
- Safie, Inu Kencana, dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, (1999): hlm.75-93
- Sulaksana, Uyung, *Manajemen Perubahan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2004):11



- Thoha, Miftah, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Prenada Media Group, (2018): hlm.71-84
- Trott, P., Innovation Management and New Product Development, Pitman, London (1998)
- Weber, Max, Essays in Sociology, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Noorkholis menjadi Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2006): hlm. 236
- Wibowo, Manajemen Perubahan Edisi Ketiga, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, (2016): hlm.103



